

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGEDAR SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR (Studi Putusan Nomor 674/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)

**Oleh
Fajar Mulana**

Salah satu tindak pidana yang meresahkan kehidupan masyarakat adalah pengedaran obat tradisional yang tidak memiliki izin edar, yang sebagaimana diatur dalam Pasal 196 dan 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Contohnya dalam putusan 674/PID.Sus/2022/PN.Tjk, tindak pidana sediaan farmasi yang pelaku menjual obat tradisional tanpa izin edar dan kandungan didalamnya mengandung bahan kimia. Permasalahan dalam penelitian ini bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar dan putusan sudah memenuhi asas keadilan substantif

Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Penyidik bagian Badan Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung (PPNS BPOM), Dosen bagian pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Sedangkan pengolahan data dan penyusunan data. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan bahwa adanya pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku pengedar sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar pada putusan Nomor 674/PID.Sus/2022/PN.Tjk. setelah mempertimbangkan segala aspek secara teliti, termasuk alasan pembeda dan pemaaf, hal yang memberatkan dan meringankan hukuman, serta seluruh fakta-fakta yang ada dipersidangan dan keterangan para saksi. Demikian putusan tersebut sudah termasuk ke Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang seharusnya dalam pasal tersebut terdakwa bisa dihukum lebih berat dari putusan tersebut. Sudah selayaknya majelis hakim mempertimbangkan Kembali apakah pidana

Fajar Mulana

yang dijatuhkan sudah seimbang dan sesuai apa yang terdakwa lakukan. Majelis hakim pada perkara 674/Pid.Sus/2022/PN.Tjk pada keadilan substansif seharusnya bisa lebih optimal karena jika putusan tersebut ancaman pidananya bisa lebih berat akan menghasilkan penyelesaian yang adil bagi para pihak saja, tetapi juga memiliki keterlibatan yang luas bagi sistem hukum di Indonesia.

Saran pada penelitian ini hakim dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan kembali fakta-fakta, bukti yang dijabarkan dipersidangan sehingga dalam membuat keputusan harus jelas dan adil, selain itu juga hakim harus memperhatikan aspek yang meringankan dan memberatkan, serta teliti dalam melihat kondisi pelaku mengenai penyebab timbulnya tindak pidana yang dilakukannya sehingga dengan itu semua masyarakat berharap tidak ada lagi kejadian yang merugikan masyarakat Indonesia.

Kata Kunci : Putusan Hakim, Pelaku, Sediaan Obat Herbal, Tanpa Izin Edar

ABSTRACT

ANALYSIS OF JUDGES CONSIDERATIONS IN IMPOSING CRIMINAL DECISIONS ON THE PERPETRATORS OF THE DISTRIBUTION OF PHARMACEUTICAL PREPARATIONS THAT DO NOT HAVE DISTRIBUTION PERMITS (STUDY OF DECISION NUMBER 674/PID.SUS/2022/PN.TJK)

**By
Fajar Mulana**

One of the criminal acts that have disturbed people's lives is the distribution of traditional medicines that do not have a distribution permit, as regulated in Articles 196 and 197 of Law Number 36 of 2009 concerning Health. For example, in Decision 674/PID.Sus/2022/PN.Tjk, the crime of pharmaceutical preparation in which the perpetrator sold traditional medicine without a distribution permit and the content contained chemicals. The problem in this study is how the basis of the judge's consideration in imposing a sentence on a person who commits a criminal act of distributing pharmaceutical preparations without a distribution permit and the decision has fulfilled the principle of substantive justice.

The problem approach in this research uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach, the data used are primary data, secondary data and tertiary data. The sources in this research are Judges of the Tanjung Karang District Court, Investigators of the Bandar Lampung Food and Drug Supervisory Agency (PPNS BPOM), Lecturers in the criminal section of the Faculty of Law, University of Lampung. While data processing and data preparation. Data analysis using qualitative analysis

The results of the research and discussion are that there is a consideration of the judge in imposing a criminal decision on the perpetrator of the distribution of pharmaceutical preparations that do not have a distribution permit in Decision Number 674/PID.Sus/2022/PN.Tjk. after carefully considering all aspects, including justification and excuse, aggravating and mitigating circumstances, as well as all the facts in the trial and witness testimony. Thus, the decision was included in Article 197 of Law Number 36 of 2009 concerning Health, which should have resulted in the defendant being punished more severely than the a forementioned decision. It is appropriate for the panel of judges to reconsider whether the criminal The results of research and discussion that there is a consideration of the judge in imposing a criminal judgment against the perpetrator of the distribution of pharmaceutical preparations that do not have a distribution permit in Decision Number 674/PID.Sus/2022/PN.Tjk. after carefully considering all aspects, including justification and excuse, aggravating and mitigating circumstances, as well as all the facts in the trial and witness testimony. Thus, the verdict is included in Article 197 of Law Number 36 of 2009 concerning Health, in which article the defendant should have been punished more severely than the a

Fajar Mulana

forementioned verdict. It is appropriate for the panel of judges to reconsider whether the sentence of

The suggestion in this study is that the judge in imposing a sentence must reconsider the facts, evidence described in the trial so that in making a decision it must be clear and fair, besides that the judge must pay attention to the mitigating and aggravating aspects, and be careful in looking at the condition of the perpetrator regarding the cause of the crime he committed so that with all of that the community hopes that there will be no more incidents that harm the people of Indonesia.

Keywords : Judge's verdict, perpetrators, herbal medicine preparations, no distribution license